

# Lelang Kapal Rp 1,2 M Bermasalah

■ Pengadaan Kapal Melalui APBD Rembang Diduga Sarat Korupsi

**REMBANG-** Rencana Pemkab Rembang melelang kapal berjenis pengumpul ikan (collecting ship) "Makmur" hasil pengadaan Dinas Perikanan dan Kelautan (Disperklut) melalui APBD tahun 2007 senilai Rp 1,2 Miliar, kini

diduga sarat ketidakberesan. Tidak hanya itu, minimnya publikasi hasil pengelolaan kapal, ditengarai telah lama jadi ajang pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.

Pegiat LSM Anti Korupsi di

Kabupaten Rembang Bambang Wahyu Widodo menuturkan, persoalan itu muncul sejak awal proyek pengadaan Kapal Ikan Makmur yang dibuat tahun 2007 dan diresmikan setahun kemudian. Dalam proyek pengadaan

kapal ini, Pemkab Rembang terkesan tidak transparan kepada masyarakat dalam penggunaan uang APBD. "Yakni terkait siapa yang mengelola, berapa hasil yang didapat dan kemana hasil uang itu diserahkan," ujar

Bambang.

Bahkan kabarnya, kata Bambang, Kapal Makmur sempat dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang dan diperuntukkan penggunaannya kepada salah satu SMK di

Rembang. Pihaknya mengaku telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Plt. Bupati Rembang Abdul Hafidz, bahwa penjual kapal telah disetujui melalui

► Baca **LELANG...** Hal 11

## ■ LELANG

surat rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Namun persoalannya Pemkab Rembang perlu transparan terkait surat rekomendasi dari BPK tersebut," katanya.

Karena dimungkinkan, lanjut Bambang, hasil pengelolaan kapal masuk ke kantong pribadi oknum tertentu. Untuk itu, perlu ditelusuri aliran dana hasil pengelolaan kapal tersebut. Masyarakat harus tahu, karena hal itu menyangkut uang negara. "Masalah lainnya, yakni spesifikasi kapal ketika dianggarkan. Meskipun kapal berbobot 80 GT itu diklaim pemer-

intah berjenis Collecting Ship, namun nyatanya tidak memenuhi persyaratan spesifikasi," paparnya.

Menurut Bambang, kapal Makmur lebih mirip kapal nelayan biasa. Karena itu, ditengarai adanya dugaan markup anggaran dalam proyek pengadaan kapal tersebut. "Melihat spesifikasinya, maka kapal Makmur bukan termasuk kategori collecting ship, melainkan kapal nelayan biasa. Karena collecting ship bentuknya tidak akan seperti itu," terangnya.

Bambang menjelaskan, kapal collecting ship seharusnya dilengkapi dengan peralatan canggih, seperti mesin pendingin untuk mengawetkan ikan.

## Sambungan Halaman 08

Pihaknya menduga harga kapal sesungguhnya tidak mencapai Rp 1,2 Miliar.

Sementara itu, Pemkab Rembang mengklaim penjualan kapal Makmur sudah prosedural sesuai ketentuan perundang-undangan. Melalui surat kajian nota dinas yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Rembang tertanggal 12 Juni 2014, Pemkab Rembang beralasan lebih baik kapal Makmur dijual atau dilelang. Selain itu, dikhawatirkan cepat rusak dan nilai jual kapal tersebut bakal anjlok.

Sekedar diketahui, kapal seberat 80 GT dengan pan-

jang 21 meter dan lebar 6.53 meter yang dipersoalkan itu, kini kondisinya mangkrak di perairan sungai Juwana Kabupaten Pati. Sejak pertama diresmikan pada tahun 2008 lalu, kapal yang dibiayai APBD Rembang tidak beroperasi. Sebab terkendala regulasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) yang melarang aset pemerintah dipakai untuk kegiatan usaha.

Dikonfirmasi terpisah melalui pesan singkat yang dikirimkan wartawan koran ini, Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz maupun dinas terkait masih bungkam terkait persoalan rencana lelang Kapal Makmur itu. (cw1)